

LKIP  
2020



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)

# BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

[www.bkpp.baritokualakab.go.id](http://www.bkpp.baritokualakab.go.id)

**BKPP**  
**KAB. BARITO KUALA**

LKIP 2020

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Laporan Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban seperti diamanatkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

BKPP Kabupaten Barito Kuala telah menyelesaikan sejumlah program dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi dari Rencana Kerja Tahun 2020 yang juga masa pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis BKPP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Rencana Strategis BKPP Tahun 2017-2022 memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan memuat persepektif keberhasilan dan kegagalan yang akan menjadi tantangan bagi BKPP Kabupaten Barito Kuala melalui peningkatan kinerja yang lebih baik, fokus dan terarah.

Penyusunan laporan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam menilai kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance.

Marabahan, 15 Februari 2021

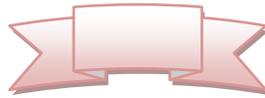
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,**

  
**Drs. H. AKHMAD MAWARNI, M.Pd**  
NIP. 19640601 198406 1 001

## Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPP Kabupaten Barito Kuala	4
----------	----------------------------------------------------------------	---

## Daftar Tabel



## RINGKASAN EKSKUTIF

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan capaian ke dua Indikator Kinerja Utama belum mencapai target, dengan rincian :

- a) Persentase PNS yang memenuhi kompetensi 90,54 %
- b) Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian 90,00 dengan nilai SANGAT BAIK karena angka indek **90,00** berada pada interval konversi >90.

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dibidang Kepegawaian. Sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja maka laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator , dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel A**

**Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya sumberdaya aparatur yang kompeten	1	90,54 %	-	0%	0	0%	1	90,54
2	Meningkatnya Pelayanan Apartur Yang Berkualitas	1	90	-	Indek	1	100	-	-

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	5
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>7</b>
2.1. Perencanaan Strategis	7
2.2. Indikator Kinerja 2020	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>11</b>
3.1. Capaian Kinerja	11
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	15
3.3. Analisis Capaian Kinerja	17
3.4. Akuntabilitas Keuangan	41
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>51</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPP Kabupaten Barito Kuala	4
----------	----------------------------------------------------------------	---



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator .....	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama .....	8
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja .....	9
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian kinerja .....	11
Tabel 3.2	Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja Yang tidak tercapai .....	12
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Utama .....	12
Tabel 3.1.2	Capaian IKU berdasarkan presentase .....	13
Tabel 3.1.3	Capaian IKU berdasarkan kategori .....	13
Tabel 3.2.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	14
Tabel 3.1.5	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 .....	14
Tabel 3.1.6	Pencapaian Target Sasaran Strategis .....	15
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Tahun 2020 .....	16
Tabel 3.2.2	Perbandingan Target dan Realisasi IKU I Tahun 2020 .....	17
Tabel 3.2.3	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu .....	18
Tabel 3.2.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja .....	19
Tabel 3.2.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020 .....	21
Tabel 3.2.6	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 Tahun 2020 .....	22
Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu .....	23
Tabel 3.2.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja .....	23
Tabel 3.2.9	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra .....	24
Tabel 3.2.10	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 2 .....	40
Tabel 3.2.11	Komposisi Belanja BKPP .....	42
Tabel 3.2.12	Pagu dan Realisasi Anggaran .....	42
Tabel 3.2.13	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran .....	43
Tabel 3.2.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran .....	50

# Bab I Pendahuluan

## I.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala sebagai lembaga teknis daerah dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja menuju kearah yang lebih baik.

Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 pasal 25 Menyatakan bahwa Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas “membantu Bupati menyelenggarakan Manajemen Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ”

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka pada pasal 25 ayat (1) dimaksud Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala kembali ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala 16

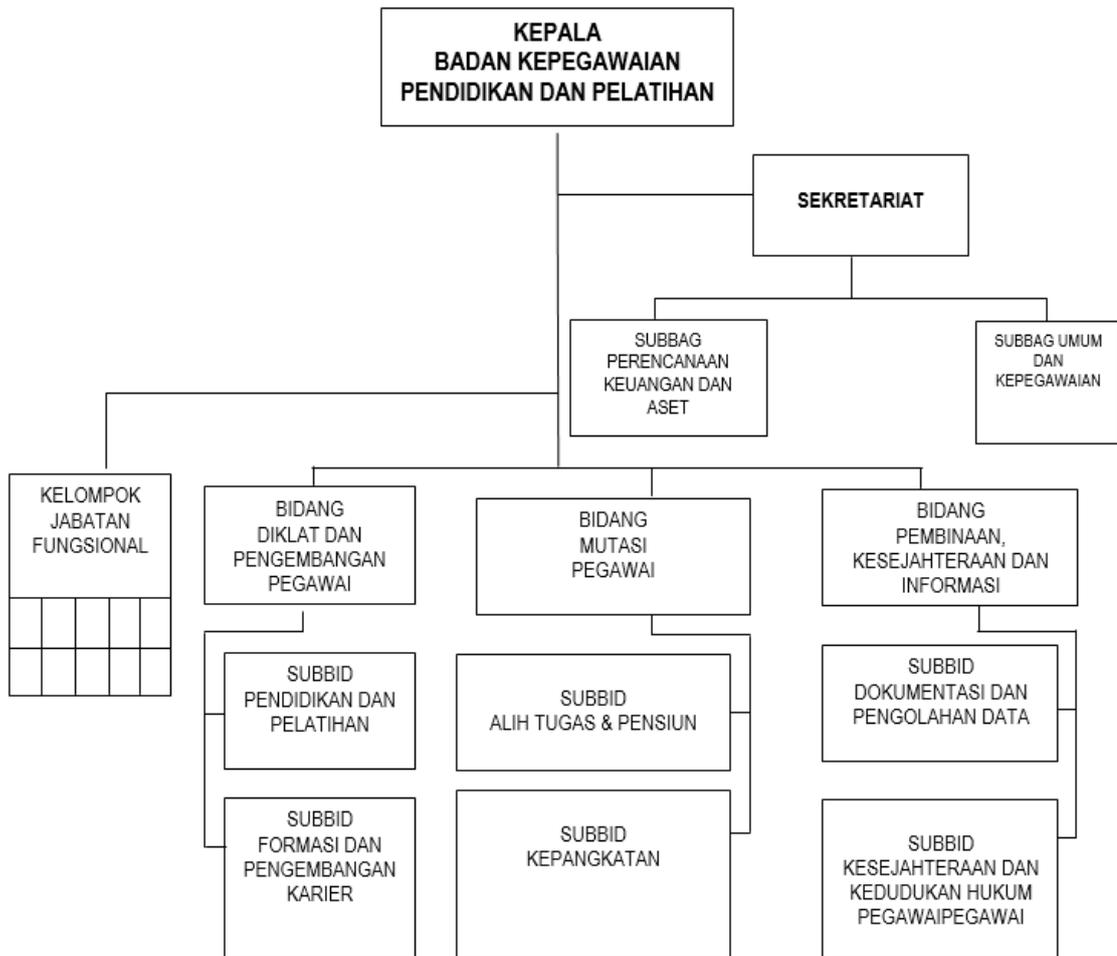
tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 17). Dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan- Badan.

Berpedoman pada Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala secara **Struktural Organisasi** terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang dibantu oleh :
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
  - Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Diklat Dan Pengembangan Pegawai dibantu oleh :  
Kepala Sub Bidang Diklat;  
Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Karier;
4. Kepala Bidang Mutasi Pegawai yang dibantu oleh:
  - Kepala Sub Bidang Alih Tugas dan Pensiun;
  - Kepala Sub Bidang Kepangkatan.
5. Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian, yang dibantu oleh :
  - Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data;
  - Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam bentuk bagan struktur organisasi dapat terlihat sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019, tanggal 16 September 2019.



### **I.3 Isu Strategis**

Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah yang berdampak pada bidang kepegawaian membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja setiap unit kerja. Dengan demikian komposisi pegawai yang ada juga sesuai kebutuhan. Komposisi pegawai dalam golongan ruang, pendidikan, dan usia menjadi persoalan dalam perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi.

Berbagai prasyarat yang berorientasi pada manajemen kepegawaian saat ini seperti analisa jabatan, klasifikasi jabatan dan standar kompetensi jabatan masih pembenahan ke arah yang lebih baik sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut ini dapat disampaikan beberapa hal yang terkait dengan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi adalah :

1. Belum sepenuhnya PNS sesuai kompetensi ;
2. Belum terlaksananya sistem remunerasi PNS berbasis kinerja ;
3. Rendahnya pemahaman pejabat kepegawaian menyangkut tupoksinya.

### **I.4 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala kurun waktu tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

## **I. 5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Insyansi Pemerintah (LKIP)**

Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, Isu Strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, landasan hukum pembuatan dokumen LKIP, dan Sistematika penulisan LKIP.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis , Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

# Bab II Perencanaan Kinerja

## 2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan Bupati Barito Kuala Nomor 256 Tanggal 4 Juni 2018 Tahun 2018, tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala adalah :

### 2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten, dengan indikator Persentase PNS yang memenuhi kompetensi.
2. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas, dengan indikator Persentase Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

### 2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, sasaran BKPP adalah :

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten
2. Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas

Secara lebih rinci tujuan, Indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Nilai Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang Memenuhi Kompetensi	Persentase PNS yang Memenuhi Kompetensi
		Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian

### 2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 dapat di lihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**

No.	Indikator Kerja Utama	Formulasi
1	2	3
1.	Persentase PNS yang memenuhi Kompetensi	Jumlah PNS yang kompeten dibagi total PNS SeKab Batola kali 100
2.	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang

## 2.1.4 Perjanjian Kinerja 2020

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, bisa dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja (PK)**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase PNS yang memenuhi Kompetensi	%	92%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	315.785.200,-
					Pendidikan Kedinasan	168.520.600,-
		Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks	90	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	768.206.270,-

Pada Tahun 2020 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito memiliki dua sasaran dengan 2 indikator kinerja yaitu Persentase PNS yang memenuhi kompetensi dan Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Indikator kinerja Persentase PNS yang memenuhi kompetensi didukung 2 (dua) program yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 315.785.200,00.
2. Program Pendidikan Kedinasan dengan anggaran sebesar Rp. 168.520.600,00.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian didukung 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 768.206.270,00

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang telah direviu, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPAP Tahun 2020.

# Bab III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel .3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### 3.1 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Nomor 188.45/19/BKPP/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	Persen	92 %	83,30 %	90,54%
2	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian	Indeks	90	90	100

Berdasarkan Tabel 3.1.1 Sasaran Strategis 1 meningkatnya sumber daya aparatur yang kompeten dengan indikator persentase PNS yang memenuhi kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 83,30 % dengan capaian 90,54 % (Jumlah PNS yang kompeten/total ASN x 100). Di bandingkan dengan realisasi tahun 2019 indikator persentase PNS yang memenuhi kompetensi target 89 % realisasi 74,99 % dengan capaian 84,26 % terjadi kenaikan sebanyak 6,28 % dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Sasaran strategis 2 meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dengan indikator Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian dengan target 90 dan realisasi 90 dengan capaian 100. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 indikator ke 2 ini dari target 85 realisasi 85,00 dengan capaian 100, terjadi kenaikan sebesar 5 % dari tahun 2020.

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Berdasarkan Persentase**  
**Tahun 2020**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	-

Berdasarkan Tabel 3.1.2 Capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan persentase <100 atau tidak tercapai sebanyak 1 dan tercapai/sesuai target sebanyak 1.

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Berdasarkan Kategori**  
**Tahun 2020**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	-
4	Kurang	50 – 64,99	-
5	Sangat kurang	0 – 49,99	-

Berdasarkan table 3.1.4 indikator yang dinilai sangat baik sebanyak 1 indikator .

**Tabel 3.1.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	90,54 %	Tidak tercapai
2	Sasaran Strategis 2	1	100	Sangat baik

Pada tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis 1 pada tahun 2020 tidak tercapai, sedangkan sasaran strategis 2 tahun 2020 dengan predikat sangat baik.

**Tabel 3.1.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 -64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1	90,54 %				Baik	
2.	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	1	100					Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.2.2, Sasaran Strategis 1 dengan jumlah indikator sebanyak 1 dan rata-rata capaian sasaran 90,54 % dengan predikat baik.

Sasaran Strategis 2 jumlah indikator sebanyak 1 dan rata-rata capaian sasaran 100 dengan predikat Sangat baik.

**Tabel 3.1.6**  
**Pencapaian Target Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1	90,54 %	0	0	0	0	1	90,54
2.	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	1	100	0	0	1	100	0	0

Dari table diatas bisa dilihat bahwa dari ke 1 indikator sasaran pencapaiannya dibawah target, yaitu Persentase PNS yang memenuhi kompetensi.

### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Nomor 188.45/19/BKPP/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, telah ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020**

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	1 indikator

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

### 3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### Sasaran Strategis 1.

#### MENINGKATNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG KOMPETEN

Sasaran “Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang terbuka dan melayani”, Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan bersih serta Pelayanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi pada sasaran “ Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan berbasis Teknologi Informasi” . Untuk upaya pencapaian sasaran ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala menetapkan indicator “Persentase PNS yang memenuhi kompetensi”.

“Persentase PNS yang memenuhi kompetensi” dengan formulasi perhitungan :

*Jumlah PNS yang memenuhi kompetensi dibagi total pegawai se Kabupaten Barito Kuala di x 100.*

Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2020.

Indikator kinerja utama” Persentase PNS yang memenuhi kompetensi” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2020 ditargetkan dengan nilai 92 % . Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan nilai realisasi sebesar 90,54 % yang diperoleh dari jumlah total ASN sebanyak 4.576 orang, sedangkan jumlah ASN yang kompeten sebanyak 3.771 ditambah yang telah mengikuti diklat sebanyak 41 orang jadi jumlah keseluruhan sebanyak 3.812 orang maka hasil capaian untuk indikator pertama ini adalah 90,54 % ( $3.771/4.576 \times 100 = 83.30 \%$  /  $92\% = 90,54\%$ ), dibandingkan dengan tahun 2019 dengan nilai capaian sebesar 74,99 % diperoleh dari jumlah ASN yang kompeten sebanyak 3.457 PNS dibagi 4.610 total ASN x 100 , maka capaian kinerja adalah 84,26 % ( $74,99\%/85\% \times 100$ ), dari hasil capaian dapat disimpulkan terdapat kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 6,28 %.

**Tabel 3.2.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi IKU**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	92 %	83,30 %	90,54

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indikator kinerja utama” Persentase PNS yang memenuhi kompetensi” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2020 ditargetkan dengan nilai 92 % , dengan nilai realisasi sebesar 90,54 %  $3.771/4.576 \times 100 = 83.30 \%$  /target tahun 2020 92% = 90,54%)

Tahun 2018 ditargetkan dengan nilai 85 %. dengan nilai realisasi sebesar 81,65 % diperoleh dari  $(81,65\%/85\% \times 100 = 96,06 \%)$ . Sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan dengan nilai 89 % dengan nilai realisasi sebesar 74,99 diperoleh dari  $(74,99\%/89\% \times 100 = 84,26 \%)$ , dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.2.3**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
			Relisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	Persen	81,65	96,06	74,99	84,26	83,30	90,54

**3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2017-2022**

Dalam pengukuran capaian kinerja jangka menengah yang diperhitungkan adalah seperti yang tertuang dalam sasaran strategis Renstra tahun 2017-2022.

Caranya adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 terhadap realisasi capaian sampai dengan tahun 2020, capaian realisasi terhadap target Renstra BKPP 2017 -2022 dapat dilihat seperti tabel :

**Tabel 3.2.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2018-2022**

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	80	92	83,30	90,54	100	90,54

#### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tidak ada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Peningkatan kompetensi aparatur dengan melalui pendidikan dan pelatihan dapat dicapai sebesar 90,54 % sedangkan pada tahun 2019 sebesar 84,26, jika dibandingkan dari kinerja tahun 2019, kenaikan hanya 6,28 %.

#### **Pencapaian kinerja dimaksud disebabkan adanya :**

1. Jumlah yang diusulkan lebih teromodir dari tahun lalu.
2. Adanya Perjanjian Kerjasama antara BPSDM Propinsi Kalimantan Selatan dengan BKPP Kabupaten Barito Kuala :
  - a. Nomor : 893/015/BPSDMD/2020 tanggal 6 Februari 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Pelatihan Dasar Calon PNS Kategori) Golongan II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

- b. Nomor : 893/016/BPSDMD/2019, tanggal 9 Maret 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I dan Angkatan II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

**Kegagalan Capaian Indikator Sasaran 1 Peresentase PNS yang memenuhi kompetensi disebabkan oleh :**

1. Adanya Pandemi Covid 19 yang melanda, sehingga menyebabkan pemanggilan peserta Diklat Kepemimpinan terbatas serta sebagian kegiatan Diklat Kepemimpinan dilakukan secara daring.).
2. Diklat PNS yang diikuti berdasarkan alokasi dana yang tersedia.
3. Terdapat PNS yang tidak memenuhi kreteria.
4. Belum dimilikinya fasilitas diklat.

**Strategi kedepan :**

1. Untuk Tahun yang akan datang agar anggaran untuk diklat dapat dirasionalisasikan.
2. Dana Diklat terpusat pada satu sumber saja yaitu satu pintu di anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.
3. Diharapkan semua peserta terpenuhi untuk mengikuti diklat dengan menambah kuota peserta dari pihak penyelenggara diklat.
4. Mengajukan pembangunan gedung diklat di daerah yang sesuai standar agar sebagian diklat dapat dilaksanakan di daerah.

**6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Tingkat efisiensi kinerja dapat dilihat dari selisih antara persentase capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran, tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat seperti tabel :

**Tabel 3.2.5**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	90,54	94,98	4,44 %

Dari data penyerapan anggaran dalam mendukung sasaran strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat adanya efisiensi anggaran dalam pencapaian targetnya.

Sasaran strategis pertama meningkatnya Sumber daya aparatur yang kompeten dengan indikator kinerja persentase PNS yang memenuhi kompetensi berdasarkan hasil assesmen terdapat tingkat efisiensi 4,44 %.

**7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Keberhasilan pencapaian Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Pada Tahun 2020 tidak terlepas dengan adanya Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh menunjang terhadap pencapaian keberhasilan. Adapun Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh dalam menunjang pencapaian kinerja utama adalah sebagai berikut :

Capaian indikator Sasaran 1 Persentase PNS yang memenuhi kompetensi dukung oleh :

**1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :**

**a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang diklat salah satunya adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani Pengembangan Kompetensi ASN, yaitu Diklat Prajabatan bagi CPNSD, untuk kinerja selama tahun 2020 adalah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan sebanyak 5 orang.

Adapun mengenai realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar 99,66% dari Rp. 14,730,000.00 yaitu telah mencapai hasil sesuai targetnya di tahun 2020.

**b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNS Daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang diklat salah satunya adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani Pengembangan Kompetensi ASN, yaitu Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah, untuk kinerja selama tahun 2020 adalah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi PNS Daerah sebanyak 17 orang.

Adapun mengenai realisasi keuangan dari kegiatan tersebut sebesar 100% dari Rp. 301,055,200.00 yaitu telah mencapai hasil sesuai targetnya ditahun 2020.

**2. Program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan :**

**a. Pendidikan dan Penjurangan Struktural**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang diklat salah satunya adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani Pengembangan Kompetensi ASN, yaitu Kompetensi Manajerial (Diklat Perjurangan Struktural), untuk kinerja selama tahun 2020 adalah :

1. Jumlah Pejabat Eselon 2 yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II sebanyak 0 orang.
2. Jumlah Pejabat Eselon 2 yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III sebanyak 0 orang.
3. Jumlah Pejabat Eselon 4 yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV sebanyak 6 orang.

Adapun mengenai realisasi keuangan sebesar 73,15% dari Rp. 168,520,600.00 yaitu hanya Rp. 123,265,000.00 adalah disebabkan karena adanya Pandemi Covid 19 yang melanda, sehingga menyebabkan pemanggilan peserta Diklat Kepemimpinan dibatasi serta sebagian kegiatan Diklat Kepemimpinan dilakukan secara daring.

Sumber data capaian adalah target di Renstra 299 sedangkan realisasi di tahun 2020 sebanyak 41 PNS yang mengikuti Diklat, target kuota tidak memenuhi target di Renstra karena adanya pandemic Covid-19. Sumber Data diperoleh dari Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.

## Sasaran Strategis 2.

### **MENINGKATNYA PELAYANAN APARATUR YANG BERKUALITAS**

Untuk melihat capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas**” Upaya pencapaian sasaran ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala menetapkan indikator kinerja, yaitu Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

Persentase kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian dengan formulasi perhitungan :

***“Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi di kali nilai penimbang”***

Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2020**

Indikator kinerja utama” Persentase kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian” berdasarkan Renstra 2017-2022.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 indikator tersebut pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.6**  
**Perbandingan Target dan Realisasi IKU**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indek Kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	90	90	100

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indek Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada tahun 2020 target 90 realisasi 90 dengan capaian target 100 dibandingkan dengan tahun 2018 target 80 realisasi 76,47 dengan capaian target 95,59 sedangkan pada tahun 2019 target 85 realisasi 85 dengan realisasi 100 jadi terdapat kenaikan dari tahun lalu , dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.7**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks	75,47	95,59	85	100	90	100

**3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2017-2022**

Target dan realisasi indicator kinerja utama (IKU) 2020 dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.2.8**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2018-2022**

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	75	90	90	100	100	100

**Tabel 3.2.9**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019	Target Renstra	Selisih Capaian	Ket.
			Realisasi	Realisasi	(%)	
1.	Indek kepuasan PNS terhadap pelayanan Administrasi kepegawaian	Indek	90	90	100	Capaian diperoleh dari realisasi dibagi target renstra

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pada :

Hasil Survey Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian (IKM ) ini adalah dilingkungan SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala yang mana Respondennya adalah PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pelaksanaan Survei Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian (IKM) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 sampai dengan Desember 2020.

Pengolahan Data Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian di hitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur Pelayanan. Dalam penghitungan Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian terhadap 9 unsur survei IKM.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, dengan melakukan penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dan pengaduan, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran serta.

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan secara tetap setiap 1 (satu) tahun sekali. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisis survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

#### A. Data Kuesioner

Gambaran karakteristik responden Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah PNS (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	155	53,33
Perempuan	145	46,67
Jumlah	300	100

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Jumlah PNS	
	N	%
18-25	39	5
26-35	146	33,33
36-45	98	9,3
46-60	17	16,83
Jumlah	300	100

Tabel 3. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS (orang)	Persentase (%)
SMA	45	31,33
Diploma III/IV	92	29,33
Sarjana S1/S2	163	39,34
Jumlah	300	100

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka jumlah sampel untuk Survei Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2020 sebanyak 300 orang responden.

Dari jumlah responden sebanyak 300 orang tersebut, jumlah kuesioner yang telah dikembalikan sebanyak 300 lembar kuisisioner, dan jumlah kuisisioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah sebanyak 300 lembar kuisisioner.

## B. Perhitungan

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik.

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi Nilai. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur, maka :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 9. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	BAIK
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK

Dari kuesioner yang disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jumlah 300 lembar kuisisioner, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 10. Nilai Masing-Masing Unsur Pelayanan

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan Pelayanan	1203	<b>4,01</b>	0,04
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1204	<b>4,01</b>	0,44
3	Waktu Penyelesaian	1204	<b>4,01</b>	0,44
4	Biaya/Tarif Pelayanan	1204	<b>4,01</b>	0,44
5	Kesesuaian Produk Layanan	1196	<b>3,98</b>	0,44
6	Kompetensi Pelaksana dalam Pelayanan	1196	<b>3,98</b>	0,44
7	Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan	1203	<b>4,01</b>	0,44
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1204	<b>4,01</b>	0,44
9	Penanganan Pengaduan	1199	3,99	0,44

Dari tabel 10 di atas, terlihat bahwa unsur persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, perilaku pelaksana dalam pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah 4,01 , sedangkan Unsur kesesuaian produk dalam layanan dan kompetensi pelaksana dalam pelayanan memiliki nilai terendah yaitu 3.98.

## C. Deskripsi Hasil

### 1. Unsur Persyaratan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,40 dan tahun 2019 sebesar 3,68.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Nilai Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei		
	2018	2019	2020
Kesesuaian Persyaratan	3,40	3,68	4,01

Untuk 2020 unsur kesesuaian persyaratan pelayanan telah dibuat persyaratan baku disesuaikan peruntukannya.

### 2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,45 dan 2019 sebesar 3,85.

Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Nilai Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei		
	2018	2019	2020
Kemudahan Prosedur	3,45	3,85	4,01

Untuk 2020 unsur kemudahan prosedur pelayanan dibuat sesuai SOP.

### 3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,19 dan 2019 sebesar 3,85

Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei		
	2018	2019	2020
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,19	3,85	4,01

Untuk 2020 unsur kecepatan waktu pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat kerja yang memadai dan petugas yang selalu ada ditempat serta di sesuaikan SOP Pelayanan.

### 4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tariff Pelayanan sebesar 3,99 dan 2019 sebesar 4,01.

Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei		
	2018	2019	2020
Kewajaran biaya/tariff Pelayanan	3,99	4,01	4,01

Untuk 2020 nilai kewajaran biaya/tarif pelayanan dipengaruhi dengan cara petugas pelayanan dalam melayani masyarakat dengan tidak menerima biaya dari ASN.

#### 5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,24 dan 2019 sebesar 3,68.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Nilai Unsur Kesesuaian Produk Layanan Tahun 2018 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei		
	2018	2019	2020
Kesesuaian Produk Layanan	3,24	3,68	3,98

Untuk 2020 kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan TUPOKSI Badan.

#### 6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,00 dan 2019 sebesar 3,34

Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Nilai Unsur Kompetensi Petugas Tahun 2018 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei		
	2018	2019	2020
Kompetensi Petugas Pelayanan	3,30	3,34	3,98

Untuk 2020 kompetensi petugas telah di tingkatkan dengan mengikuti workshop, bimbingan tekhnis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur prilaku petugas sebesar 3,00 dan 2019 sebesar 3,68.

Hasil nilai survei untuk unsur prilaku petugas tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Nilai Unsur Prilaku Petugas Tahun 2018 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei		
	2018	2019	2020
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,00	3,68	4,01

Untuk 2020 perilaku petugas di harapkan dapat meningkatkan pelayanan dan siap melayani dengan ramah

#### 8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,40 dan tahun 2019 sebesar 4,01.

Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Nilai Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Tahun 2018 s.d. 2020.

Unsur	Nilai Survei		
	2018	2019	2020
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,40	4,01	4,01

Untuk 2020 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan di harapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal.

## 9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,28 dan tahun 2019 sebesar 3,85.

Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Nilai Unsur Penanganan Pengaduan Tahun 2018 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei		
	2018	2019	2020
Penanganan Pengaduan	3,28	3,85	3,99

Untuk 2020 penanganan pengaduan pelayanan ASN sudah mengerti dan paham akan prosedur pelayanan yang ada di BKPP.

Berdasarkan uraian di atas, maka didapat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### A. Kesimpulan

Secara umum kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dikategorikan oleh ASN penggunaanya pada posisi **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena angka indek **90** berada pada interval konversi 88,31 - 100,00.

### B. Saran dan Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pelayanan yang mendapat nilai tertinggi yaitu :

1. persyaratan pelayanan,
2. sistem, mekanisme dan prosedur,
3. waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan,
4. perilaku pelaksana dalam pelayanan dan
5. kualitas sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa terdapat 2 (dua) unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah yaitu :

1. Kompetensi Petugas Pelayanan
2. Penanganan pengaduan

Adapun Fasilitas – fasilitas pelayanan yang sudah tersedia diantaranya :

1. Ruang pelayanan satu pintu.
2. Ruang tunggu yang memadai.
3. Petugas pelayanan yang selalu siap melayani ASN dalam menyelesaikan setiap urusan sesuai bidang yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun Saran – saran yang dapat diberikan untuk Petugas Pelayanan Satu Pintu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala yaitu siap melayani dan membantu ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

#### **4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional**

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tidak ada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional.

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

**Capaian indikator Sasaran 2 Persentase kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian didukung oleh :**

1. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan :

**a. Seleksi penerimaan CPNS,**

Capaian kinerja kegiatan seleksi CPNS dengan target 175 orang realisasi 173 orang atau 98,85 % hasil evaluasi sesuai Rekonsiliasi integrasi hasil SKD-SKB CPNS 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di Shangri La Hotel Jakarta terdapat 2 formasi lowong karena jumlah pelamar kurang dari formasi yang tersedia.

Untuk kegiatan ini pagu sebesar Rp. 305.766.120,00 realisasi sebesar Rp 276.683.370,00 atau 90,49 %.

Disarankan kepada Panselnas agar formasi yang lowong dapat dioptimalisasikan pada tahun yang sama dengan diisi jabatan lain yang jumlah pelamarnya melebihi jumlah formasi.

**b. Penempatan PNS,**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang alih tugas dan pensiun adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani mutasi dan pensiun. Adapun realisasi kinerja selama tahun 2020 adalah :

1. Jumlah PNS Mutasi antar unit kerja 116 orang
2. Jumlah jabatan yang terisi akibat mutasi promosi 249 pada Tanggal 15 Januari 2020 dan 171 orang pada pelantikan 30 Desember 2020 yang tercantum dalam dalam 12 Surat Rekomendasi Baperjakat dan Pansel JPT Pratama.
3. SK Pensiun BUP 130 orang
4. SK Pensiun APS 6 orang
5. SK pensiun Janda/Duda/Yatim 10 orang

Adapun mengenai realisasi keuangan yang hanya sebesar 54,68% dari Rp. 168,140,600.00 yaitu hanya Rp. 91,940,600.00 adalah disebabkan karena anggaran yang disiapkan untuk Assesment Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 36 orang namun peserta yang mendaftar hanya 12 orang, yang terdiri dari masing-masing 4 pelamar untuk 3 jabatan yang dilelang. Oleh karena itu anggaran yang tersedia untuk biaya assesment hanya dapat direalisasikan sebanyak 12 orang dari 36 orang yang dianggarkan.

Langkah strategis yang akan dilakukan dalam upaya pemenuhan realisasi ini dimasa mendatang adalah dengan cara memastikan pendaftar Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memenuhi kuota maksimal dengan cara mempermudah proses pendaftaran melalui penyampaian pengumuman

dalam jangka waktu lebih lama ataupun dengan penugasan dari pimpinan Daerah kepada kandidat-kandidat potensial yang memenuhi syarat.

#### **c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang kepangkatan adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani proses kenaikan pangkat. Adapun realisasi kinerja selama tahun 2020 adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Naik Pangkat Periode April 2020 dengan jumlah sebanyak 315 orang dan telah mendapat Nota persetujuan dan telah dibuatkan SK sebanyak 308 berkas/orang, sedangkan sebanyak 7 berkas Kenaikan Pangkat TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Naik Pangkat Periode Oktober 2020 dengan jumlah sebanyak 313 berkas/orang dan telah mendapat Nota persetujuan Teknis dan telah dibuatkan SK sebanyak 303 orang, sedangkan sebanyak 7 berkas Kenaikan Pangkat TMS (Tidak Memenuhi Syarat), dengan demikian maka jumlah Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 2020 yg telah dibuatkan SK sebanyak 611 orang.

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 78.897.400,00 dari pagu sebesar Rp. 78.937.400,00 atau 99,95%.

Salah satu hambatan yang ditemui dalam proses kenaikan pangkat adalah belum seluruh pejabat fungsional memenuhi persyaratan sertifikasi kompetensi, hal ini perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder baik SKPD-nya sendiri termasuk Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk dapat mendorong pejabat-pejabat fungsional mampu dan lulus uji kompetensi tiap jenjang jabatan yang akan diampunya.

#### **d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Kepegawaian Daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang dokumentasi dan pengolahan data adalah mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga untuk hosting server aplikasi E-Kinerja dan menyediakan data kepegawaian yang akurat melalui aplikasi SIMPEG dan SAPK BKN yang selalu dilakukan peremajaan/update data ASN. Kegiatan ini dengan target 1500 orang dan telah realisasi sebanyak 1500 orang atau 100%.

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 55.509.097,00 dari pagu sebesar Rp. 74.919.000,00 atau 74.09%.

**e. Pemberian penghargaan bagi ASN**

Kegiatan yang tercantum dalam Pemberian Penghargaan bagi PNS adalah

- Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala : 1420 lembar
- Penerbitan surat Cuti : 597 lembar
- Usul Satyalancana Priode Agustus 2020 : 111 berkas
- Usul Satyalancana Prioder November 2020 : 152 berkas

Adapun target fisik pemberian penghargaan bagi PNS sebanyak 393 adalah pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya. Sedangkan yang terealisasi hanya 263 usulan. Hal ini karena penghargaan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS setelah interval masa kerja 10 tahun, yaitu setelah masa kerja 10, 20 dan 30 tahun, sehingga setiap tahun tidak semua PNS dapat diusulkan mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

Selain itu beberapa usulan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Kementerian Dalam Negeri akibat ketidaksesuaikan berkas yang dipersyaratkan dengan ketentuan dari Kemendagri dan Sekretariat Militer Presiden, sehingga mengakibatkan target fisik 393 orang yang mendapat Penghargaan, hanya terealisasi sebanyak 263 orang.

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 49.250.226,00 dari pagu sebesar Rp. 52.262.400,00 atau 94,24 %.

**f. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses Rapat Majelis berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan permohonan ijin perceraian, yang menghasilkan rekomendasi pemberian sanksi dan pemberian ijin perceraian terhadap PNS yang bersangkutan.

Adapun hasil dari 12 kali rapat Majelis yang dituangkan dalam 12 rekomendasi memuat :

- Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 5 PNS
- Jumlah PNS yang diberikan izin cerai sebanyak 14 PNS

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 60.496.980,00 dari pagu sebesar Rp. 61.678.150,00 atau 98,08 %.

**g. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang diklat salah satunya adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani Pengembangan Kompetensi ASN, yaitu Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas,

untuk kinerja selama tahun 2020 adalah Jumlah ASN Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar dengan Pendidikan D.III Teknologi pada Poltekkes BSI Yogyakarta. Sebanyak 1 orang.

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 20.000.000,00 dari pagu sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100 %.

**h. Pelaksanaan sumpah/janji PNS.**

Capaian Kinerja kegiatan Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan realiasi 100% dari 122 orang CPNS Formasi 2018 telah disumpah sebanyak 122 orang. Meskipun terjadi pandemic Covid-19 yang membuat kegiatan pengumpulan massa tidak dapat dilakukan, namun sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 10/SE/IV/2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona maka kegiatan Sumpah/Janji PNS ini dapat terlaksana.

Pelaksanaan sumpah/janji ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik/teleconference melalui aplikasi zoom dengan beberapa titik yang tersebar di kecamatan-kecamatan Kabupaten Barito Kuala.

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 6.120.500,00 dari pagu sebesar Rp. 6.502.500,00 atau 93,83 %.

**Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 2** Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian disebabkan oleh berdasarkan hasil survai kepuasan masyarakat terhadap indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian semua unsur **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena angka indeks **90** berada pada interval konversi 88,31 - 100,00.

Pelayanan administrasi kepegawaian pendukung IKU adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai yang mana masing – masing unsur kegiatan tercapai 100 %.

**Kegagalan capaian Indikator Sasaran 2** Persentase kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian, sebagai berikut :

1. Masih belum tersedianya petugas khusus pelayanan yang kompeten.

**Srategi kedepan :**

1. Untuk meningkatkan kompetensi petugas agar mengikuti workshop, bimbingan tekhnis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

**Tabel 3.2.10**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan Administrasi kepegawaian	100	83,17	83,17

Dari data penyerapan anggaran dalam mendukung sasaran strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat adanya efisiensi anggaran dalam pencapaian targetnya.

Sasaran strategis kedua meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dengan indikator kinerja indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan hasil assesmen terdapat tingkat efisiensi 83,17 %.

#### **7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh dalam menunjang pencapaian kinerja utama adalah sebagai berikut :

2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan :
  - a. Seleksi penerimaan CPNS,
  - b. Penempatan PNS,
  - c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
  - d. Pembangunan dan pengembangan system informasi Kepegawaian Daerah
  - e. Pemberian Penghargaan terhadap ASN
  - f. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
  - g. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dan
  - h. Pelaksanaan sumpah/janji PNS.

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 5.012.727.479,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.142.359.336,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,98 %.

Komposisi belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun 2020, sebagai berikut :

**Tabel 3.2.11**  
**Komposisi Belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun Anggaran 2020**  
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	2.301.168.710,00	1.764.218.020,00	89,96
2	Belanja Tidak Langsung	2.711.558.769,00	2.378.141.316,00	87,70
<b>Jumlah</b>		<b>5.012.727.479,00</b>	<b>4.142.359.336,00</b>	<b>94,98</b>

*Sumber: Laporan Keuangan tahun 2020*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 89,96 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dan sisanya sebesar 87,70 % disumbangkan belanja tidak langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.012.727.479,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.142.359.336,00 atau 94,98 %, dibandingkan dengan tahun 2019 pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.841.897.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.110.120.176,00 atau 56,38 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.12**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	484.305.200,00	455.884.364,00	94,13
2	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	768.206.270,00	638.880.173,00	83,17
<b>Jumlah</b>		<b>1.252.511.470,00</b>	<b>1.094.764.537,00</b>	<b>87,40</b>

*Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.13**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1	90,54	455.884.364,00	94,13
2	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	1	90	638.880.173,00	83,17
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>180,54</b>	<b>1.094.764.537,00</b>	<b>88,65</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 terdapat pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan Administrasi kepegawaian terdapat Program Peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya menunggu petunjuk teknis terbaru tentang pakaian dinas ASN.

## 1.4 Analisa Efisiensi Anggaran

Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan anantara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan membandingkan antara target dan realisasi (1) anggaran, (2) realisasi fisik.

Kode	Program dan kegiatan	Anggaran 2020	Realisasi sd. 31 Des 2020	%	Fisik (%)
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
01.01	Pelayanan jasa surat menyurat	11.660.000,00	10.815.000,00	92,75	100
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	42.483.085,00	35.172.416,00	82,79	100
01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	0,00	0,00	0
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan Dinas/operasional	4.750.000,00	3.951.600,00	83,19	100
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.823.170,00	28.641.600,00	75,73	100
01.10	Penyediaan alat tulis Kantor	65.649.625,00	49.802.650,00	75,86	98,46
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.971.030,00	29.880.100,00	93,46	99,97
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.999.830,00	8.710.000,00	96,78	100
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000,00	3.540.000,00	65,56	100
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	32.075.000,00	28.529.000,00	88,94	100

01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	59.513.200,00	58.010.349,00	97,47	100
01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	2.588.100,00	2.485.487,00	96,04	
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>				100
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	63.616.000,00	63.102.000,00	99,19	100
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	416.520.200,00	164.991.000,00	39,61	100
02.10	Pengadaan Mebeleur	32.167.200,00	31.656.000,00	98,42	100
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	69.414.000,00	62.400.000,00	89,90	100
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	63.600.000,00	21.302.404,00	33,49	
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	14.620.000,00	2.720.000,00	18,60	0
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	35.000.000,00	13.190.977,00	37,69	
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				100
03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	00,00	0,00	0,00	100
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
05.06	Pendidikan & pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	14.730.000,00	14.680.000,00	99,66	100
05.08	Pendidikan & pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD	301.055.200,00	301.054.364,00	100	100
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				100
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	36.661.200,00	35.944.500,00	98,05	

	Kinerja SKPD				
06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	00,00	00,00	0,00	100
06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	14.145.000,00	12.608.400,00	89,14	
<b>28</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>				62,56
28.02	Pendidikan penjenjangan struktural	168.520.600,00	142.150.000,00	84,35	100
<b>30</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>				126
30.02	Seleksi penerimaan PNS	305.766.120,00	276.683.370,00	90,49	100
30.03	Penempatan PNS	168.140.600,00	91.940.600,00	54,68	55,47
30.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	78.937.400,00	78.897.400,00	99,95	100
30.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	74.919.100,00	55.509.097,00	74,09	100
30.08	Pemberian Penghargaan bagi PNS	52.262.400,00	49.250.226,00	94,24	
30.09	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	61.678.150,00	60.496.980,00	98,08	
30.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	100	
30.18	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	6.502.500,00	6.102.500,00	93,85	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.301.168.710,00	1.764.218.020,00	76,67	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.711.558.769,00	2.378.141.316,00	87,70	
	JUMLAH BELANJA TOTAL	5.012.727.479,00	4.142.359.336,00	82,64	

- **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan**

Sisa Anggaran Rp. 870.368.143,00

Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun anggaran yang sudah dicairkan. Sisa anggaran yg sdh dicairkan (UYHD) sebesar Rp. 89.975,00 dan sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp. 870.278.168,00.

Sisa anggaran secara keseluruhan terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja tidak langsung	2.711.558.769,00	2.378.141.316,00	333.417.453,00
2	Belanja langsung	2.301.168.710,00	1.764.218.020,00	536.950.690,00
	Jumlah	5.012.727.479,00	4.142.359.336,00	870.368.143,00

**Realisasi Belanja**

Belanja tidak langsung Rp. 2.378.141.316,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.661.841.672,00	1.337.406.579,00	80,48
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.049.717.097,00	1.040.734.737,00	99,14
	Jumlah	2.711.558.769,00	2.378.141.316,00	87,70

Belanja Langsung Rp. 1.764.218.020,00

**Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 1.768.059.810,00 dengan rincian sebagai berikut :**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai habis	116.533.445,00	88.338.080,00	75,80
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	51.419.180,00	43.366.000,00	84,34
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.613.085,00	96.584.643,00	76,89

5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.150.000,00	14.831.174,00	25,95
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.860.700,00	57.544.000,00	93,02
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.330.000,00	6.300.000,00	47,26
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100.877.500,00	87.299.500,00	86,54
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	00,00	00,00	0,00
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	4.550.000,00	4.550.000,00	100
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	772.634.700,00	742.989.646,00	96,16
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	49.620.000,00	15.910.977,00	32,06
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultasi	105.000.000,00	33.600.000,00	32,00
5.1.2.20	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.906.000,00	3.906.000,00	100
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	100
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	213.000.000,00	213.000.000,00	100
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non PNS	3.615.000,00	3.405.000,00	94,19
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	68.950.200,00	51.500.000,00	74,69
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.768.059.810,00</b>	<b>1.483.125.020,00</b>	<b>83,88</b>

Merupakan realiasi pengeluaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana lampiran (daftar Belanja Modal Tahun 2020).

Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase
5.2.2.28.06	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya</i>			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya Tirai Gulung	49.830.000,00	49.830.000,00	100
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya Wallpaper	11.286.000,00	11.272.000,00	99,87

5.2.3.29.04	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Mini Komputer</b>			
5.2.3.29.04	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan Sound Sistem Besar	50.000.000,00	49.533.000,00	99,07
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan komputer scaner Barcode	4.000.000,00	4.000.000,00	100
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan metal detektor	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan Switch Hub Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan alat semprot listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan Proyektor/LCD	10.350.000,00	9.270.000,00	89,56
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan Printer	9.430.000,00	8.935.000,00	94,75
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan laptop	12.075.000,00	10.500.000,00	86,96
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan AC	7.185.200,00	7.003.000,00	97,46
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan Uninterruptible power supply	11.730.000,00	6.150.000,00	52,43
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan PC Unit All In One	63.250.000,00	62.600.000,00	98,97
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan laptop gedung CAT	241.500.000,00	00,00	00,00
5.2.3.28.01	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Mebeleur</b>			
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan lemari buku	7.931.700,00	7.800.000,00	94,55
	Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan filling kabinet	4.485.000,00	4.200.000,00	
5.2.3.49.01	Belanja modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor			

	Belanja modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor pengecatan gedung kantor	43.056.000,00	43.000.000,00	99,87
	<b>Jumlah</b>	<b>533.108.900</b>	<b>281.093.000,00</b>	<b>52,73</b>

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.2.14**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran IKU ke 2**  
**Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	1	90	83,17	6,83
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>90</b>	<b>83,17</b>	<b>6,83</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.

## Bab IV Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program, maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2020 Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 hasil reviu yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2020** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategi I terdiri dari 1 indikator dengan capaian 90,54 %
2. Sasaran Startegi II terdiri dari 1 indikator dengan capaian 100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran diatas 100 % dan yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target. Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 Rp. 5.012.727.479,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.142.359.336,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 82,64 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 870.368.143,00 atau 21,01 %.

Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.252.511.470,00 dengan realisasi sebesar 1.094.764.537,00 atau 88,65 %.

Marabahan, 15 Februari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,**

  
**Drs. H. AKHMAD MAWARNI, M.Pd**  
NIP. 19640601 198406 1 001